

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tumbangnya kekuatan Orde Baru pada 21 Mei 1998, memberikan warna baru bagi kehidupan politik di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Pergantian rejim itu diikuti dengan harapan besar untuk memberlakukan pemerintahan demokratis yang sesungguhnya di Indonesia. Pemerintahan demokratis itu dipersepsikan sebagai pemerintah yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan kehendak rakyat berdasarkan kebebasan memilih. Hal demikian pula dipersepsikan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu antisipasi untuk membentuk pemerintahan demokratis itu adalah dengan munculnya kebebasan membentuk partai politik. Sebab, partai politik yang independen, tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah, akan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik. Undang Undang No 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (sebelum kemudian diubah menjadi UU. No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik) akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan jaminan pembentukan partai politik. Salah satu isi dari undang-undang itu adalah bahwa partai politik bisa dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun. Setidaknya setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, terbentuk 141 partai politik di Indonesia. Setelah melalui verifikasi, terdapat 48 partai yang diperbolehkan ikut dalam pemilu pertama di masa reformasi tahun 1999. PDI Perjuangan akhirnya mendapatkan suara

terbanyak, yakni 35.689.073 suara atau 33,74%, yang disusul oleh Partai Golkar dengan 23.741.749 suara atau 22,44% (Suroto, 2003: 184).

Namun demikian, perwujudan pemerintahan demokratis dengan indikator multipartai itu dalam perjalanannya ternyata tidak berlangsung mulus sesuai dengan keinginan reformasi. Banyak konflik partai terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di pusat, pada tingkat kelembagaan, salah satu konflik partai politik ini terlihat dengan terbentuknya Poros Tengah di MPR yang merupakan gabungan antara partai-partai Islam dengan Partai Golkar dan kemudian berhasil menggagalkan Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai presiden dan memilih Abdurahman Wahid tahun 1999.

Di daerah konflik tersebut lebih verbal dalam bentuk kekerasan. Di Bali, ketidakpuasan pendukung Megawati atas kegagalannya sebagai presiden diwujudkan dengan amuk massa. Tanggal 21 Oktober 1999, ketidakpuasan ini dimulai dengan pembakaran ban-ban bekas di jalan raya di Denpasar. Tetapi kemudian meluas menjadi destruktif dalam bentuk pembakaran dan merobohkan gedung. Di Denpasar, kompleks perkantoran Pemda Badung yang ada di Lumintang, semuanya dihancurkan massa. Kejadian ini tidak hanya terjadi di kota Denpasar tetapi juga melanda daerah-daerah lain di Bali. Beberapa gedung utama pemerintahan di Kabupaten Tabanan, Buleleng serta Jembrana roboh dihancurkan massa. Jalur lalu lintas Denpasar-Gilimanuk yang merupakan lintas utama di Pulau Bali, macet total karena sebagian besar infrastruktur jalan seperti pembatas jalan dan pohon-pohon yang berada di pinggir jalan dirobohkan ke jalan sehingga merintangai lalu lintas.

Meski kerusuhan itu kemudian berhenti setelah Megawati berhasil terpilih menjadi wakil presiden dan cukup membuat marah pendukung PDI Perjuangan mereda, tetapi kecurigaan akan persekongkolan ini terus berlanjut dan menimbulkan konflik antar partai, terutama PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Hal itu bahkan tetap kelihatan meskipun tahun 2001 akhirnya Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid. Konflik-konflik dalam skala lebih kecil terjadi sampai dengan menjelang dilangsungkannya Pemilu legislatif tahun 2004. Untuk memperlihatkan dominasi keunggulan partainya di Bali, banyak simpatisan PDI Perjuangan memasang bendera partai di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis, tanpa bisa dicegah oleh aparat keamanan maupun elit partai. Pemasangan atribut partai yang dilakukan tidak menjelang pemilu ini merupakan ungkapan politis yang ingin memberikan pesan tentang keunggulan partainya.

Kondisi inilah kemudian yang membuat gesekan-gesekan partai itu bertambah dan membuat perasaan masyarakat semakin khawatir. Di kabupaten Tabanan konflik antar partai itu, terjadi tidak saja antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar sebagai dua kekuatan yang paling bersaing tetapi juga antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain yang ikut menjadi kontestan pemilu legislatif. Di Kabupaten ini terdapat 24 partai yang ikut pemilihan umum legislatif tetapi yang paling banyak mendapatkan simpati adalah partai-partai yang mempunyai keterkaitan dengan nama Soekarno seperti misalnya PNI Marhanisme atau PNBK serta partai yang masih mempunyai kaitan dengan Orde Baru (Partai Karya Peduli Bangsa atau Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Partai-partai baru yang muncul setelah reformasi luar yang berkaitan dengan dua tema diatas, relatif kecil pendukungnya meskipun

tercatat Partai Demokrat juga berhasil meraih simpati. Karena itu konflik yang terjadi adalah antara PDI Perjuangan dengan partai-partai seperti yang disebutkan diatas.

Diantara peristiwa tersebut, konflik yang paling besar terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Ini misalnya meletus pada saat partai Golkar merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di Bali. Tanggal 25 Oktober 2003 rombongan simpatisan Partai Golkar Tabanan yang hendak melakukan perayaan ulang tahun di Padang Galak, Denpasar dihadang oleh simpatisan PDI Perjuangan di kota Tabanan. Peristiwa ini membuat rombongan yang berasal dari Kecamatan Kerambitan itu, mengalami kekacauan dan beberapa orang simpatisannya terluka berat. Konflik antara dua partai ini, sebelumnya juga pernah terjadi tetapi dalam skala yang lebih kecil. Misalnya pada bulan Agustus tahun yang sama, seorang simpatisan PDI Perjuangan mendapat ancaman dari simpatisan Partai Golkar di desa Tunjuk, kecamatan Tabanan. Akibatnya dalam beberapa hari kemudian, muncul tindakan palasan dari pihak PDI Perjuangan.

Simpatisan PDI Perjuangan juga terlibat konflik dengan simpatisan partai lain, di luar Golkar. Yang cukup diperhatikan terjadi dengan PNI Marhaenisme di Desa Bongan Lebah, ketika puluhan simpatisan PDI Perjuangan mencabuti, merusak papan nama sekretariat partai tersebut dan juga mengepung rumah tokoh-tokoh PNI Marhaenisme. Di Dusun Tegalinggah Kaja, Kecamatan Penebel simpatisan PDI Perjuangan merusak tempat sembahyang dan dapur milik simpatisan PNBK.

Kejadian bentrokan antar partai ini ternyata tetap berlangsung sampai saat kampanye pemilu legislatif bulan Maret 2004. Konflik itu, tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi marak juga di pedesaan, bahkan yang jaraknya cukup jauh dari kota

Tabanan. Pada tanggal 12 Maret 2004, pukul 06.00 Wita terjadi pencabutan sebuah bendera Partai Golkar dan bendera partai PNI Marhaenisme yang terpasang di jalanan umum Desa Sanda. Pelaku dari pencabutan itu, teridentifikasi dari massa PDI Perjuangan yang berasal dari Kecamatan Pupuan. Massa PDI Perjuangan dari Pupuan ini berangkat menuju kota Gianyar untuk melakukan kampanye. Jarak antara Pupuan dengan kota Gianyar kurang lebih 90 kilometer. Ketika lewat di jalanan Desa Sanda itulah bendera-bendera partai yang bukan identitas mereka dicabuti. Pengrusakan terhadap rumah simpatisan partai juga terjadi pada masa kampanye ini.

Studi terdahulu tentang konflik antar partai yang melibatkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar, pernah dilakukan oleh Putra Agung (2001). Konflik tersebut terjadi pada tahun 1998 di Singaraja, yang menewaskan enam orang. Studi ini lebih menekankan pada latar belakang munculnya konflik. Dalam catatan akhirnya disebutkan bahwa peristiwa itu disebabkan oleh akumulasi emosional tekanan-tekanan yang terjadi pada jaman Orde Baru yang kemudian pecah pada masa reformasi. Sejak tahun tahun 1971 ada upaya-upaya untuk memaksakan agar masyarakat Buleleng (Singaraja) masuk Golkar secara bersama-sama. Seperti juga di daerah lain di Bali, pemaksaan politik yang terjadi di Singaraja ini cukup berhasil. Ketika kemudian Orde Baru jatuh terjadilah benturan antara dua pihak, yakni pihak yang ingin tetap mempertahankan dominasi Golkar dan pihak yang menuntut pembaruan melalui PDI Perjuangan. Inilah yang memunculkan konflik yang mengakibatkan korban jiwa tersebut.

Dalam pandangan Putra Agung, disamping karena adanya benturan tersebut, munculnya konflik juga diperparah oleh lemahnya pihak keamanan dalam

menegakkan supremasi hukum. Karena itu dalam pandangannya sebagai jalan keluar, upaya yang mesti dilakukan adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat kepada paham kebangsaan yang dimulai dari tingkat lokal, yaitu desa sampai pada tingkat nasional (Agung, 2001: 88). Studi lain dari kasus konflik antar partai di Singaraja ini dilakukan oleh Rideng (2004) yang menekankan bahwa konflik yang terjadi itu disebabkan lebih oleh faktor sentimen akibat dari perbedaan partai politik.

Studi tentang konflik antar partai juga dilakukan oleh Yanuarti (2001) dalam konflik PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Pekalongan. Dalam kasus yang terjadi bulan April 1999 antara dua partai itu para simpatisan partai saling menghancurkan rumah dan bangunan masing-masing pihak. Sehingga bentrokan yang berlangsung dalam selang tiga hari itu menghancurkan belasan rumah termasuk penjarahan toko-toko. Bentrokan antara dua simpatisan partai ini dipicu oleh pidato salah seorang tokoh PPP yang dinilai menyinggung tokoh PKB dalam sebuah acara syukuran yang kebetulan disiarkan secara langsung oleh stasiun radio setempat.

Oleh Yanuati disebutkan bahwa konflik itu terjadi disebabkan oleh adanya politisasi agama, persaingan antara tokoh-tokoh agama dalam memperebutkan pengaruh di masyarakat serta persepsi dari masyarakat terhadap politik itu sendiri. Dalam konteks sejarah, pertikaian antara PKB dengan PPP tidak bisa dilepaskan dari warisan masa lalu dimana setelah Orde Baru dan terjadinya fusi antar partai politik, kekuatan NU bergabung dengan PPP (Sulistyo, 2001: 140-155)

Penelitian tentang konflik antar partai politik yang dilakukan di kabupaten Tabanan dalam tulisan ini, yakni PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme, dan PNBK lebih menekankan pada situasi menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.

Setelah peristiwa konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Singaraja tahun 1998 serta amuk massa tanggal 21 Oktober 1999, masyarakat Tabanan terlihat traumatis dengan peristiwa-peristiwa politik. Wujud traumatis itu terlihat misalnya dari warung-warung yang segera ditutup jika ada rombongan massa partai yang melintas. Disamping itu dalam rentang waktu setahun sebelum pemilihan umum legislatif 2004, konflik antar massa partai politik sering terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Tabanan. Konflik antar partai politik ini terjadi di seluruh kecamatan yang ada. Peristiwa demikian semakin membuat cemas masyarakat Tabanan akan kelangsungan pemilu 2004 di kabupaten ini.

Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 atau 1999, kabupaten-kabupaten lain di Bali yang saat itu dilanda konflik partai, menjelang pemilu legislatif ini tidak dijumpai banyak terjadi peristiwa kekerasan seperti itu. Di Tabanan dalam catatan pihak Kepolisian Resort Tabanan, justru terjadi banyak kasus kekerasan antar partai politik. Kekerasan politik itu tidak hanya terjadi di satu wilayah kecamatan tertentu tetapi menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Hal itulah yang membuat kekhawatiran masyarakat Tabanan bertambah besar seiring dengan dekatnya pelaksanaan pemilu.

Namun demikian, kenyataan kemudian memperlihatkan kekhawatiran masyarakat itu tidak sampai terjadi. Masa minggu tenang lewat tanpa ada gangguan

yang berarti dan Pemilu legislatif yang berlangsung tanggal 5 April 2004 tersebut berlangsung lancar dan aman. Demikian pula halnya dengan keadaan setelah pemilu, terutama setelah pengumuman pemenang pemilu.

Disinilah pentingnya fenomena politik di kabupaten Tabanan tersebut. Konflik antar partai yang sebelumnya cukup mengkhawatirkan masyarakat akhirnya mampu dikelola dengan baik sehingga tidak pecah menjadi konflik yang lebih besar dan tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan umum. Preseden positif ini bisa dicontoh bukan saja untuk Kabupaten Tabanan dalam mempersiapkan pemilu-pemilu selanjutnya termasuk pemilihan kepala daerah, tetapi juga bagi daerah-daerah lainnya di Bali bahkan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang bahwa persaingan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar dan partai-partai lainnya di Tabanan begitu ketat serta latar belakang meletusnya berbagai kekerasan di daerah-daerah di Bali seperti yang telah diungkapkan diatas, perluasan konflik yang terjadi di Tabanan ini sangat membahayakan. Diperlukan upaya cepat untuk mengatasi agar konflik dengan kekerasan tersebut agar tidak sampai meluas terutama saat pemilu tahun 2004. Masalah yang ingin dilihat dalam tulisan ini ada dua, yakni :

- 1). Dimensi apakah yang menyebabkan munculnya konflik partai politik di Kabupaten Tabanan?
- 2). Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif 2004?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian, terutama yang dipublikasikan kepada publik, baik dalam bentuk buku, disumbangkan kepada perpustakaan umum atau melalui diskusi-diskusi publik, kolektif maupun kelompok, akan memberikan manfaat tertentu. Dalam konteks demikian ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1). Memberikan sumbangan teoritik kepada ilmu pengetahuan, khususnya teori mengenai konflik antar partai di kabupaten Tabanan, yang bisa dimanfaatkan baik secara sosial-politik maupun akademis.
- 2). Memberikan informasi kepada masyarakat, Tabanan khususnya, tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik antar partai politik sekaligus juga memberikan masukan tambahan kepada lembaga-lembaga terkait.
- 3). Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pola-pola konflik politik (antar partai) yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.
- 4). Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di kabupaten Tabanan tentang kondisi-kondisi yang mampu menciptakan konflik antar partai.
- 5). Di masa depan, berupaya memberikan inspirasi demi tumbuhnya lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan pendidikan politik, guna mencegah konflik politik di tingkat akar rumput.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, disamping memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena konflik antar partai di kabupaten Tabanan, secara khusus adalah:

- 1). Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya konflik antar partai politik tersebut.
- 2). Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah melebar dan meluasnya konflik, baik yang dilakukan oleh partai politik, masyarakat dan lembaga terkait, menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.